

Implementasi Program Goes To School (GTS) Dalam Pelayanan Pembuatan E-KTP Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo

Disusun oleh :
Dinda Rahmawati Mujiarto Putri
(212020100043)

Dosen Pembimbing :
Dr. Isnaini Rodiyah, M.Si

Progam Studi Administrasi Publik
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Juli 2025

PENDAHULUAN

Pelayanan Berbasis E-Government

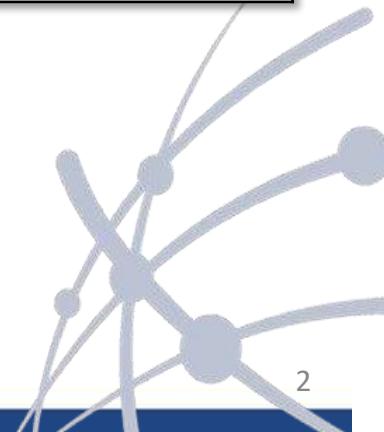
Pada era Society 5.0, pemerintah memanfaatkan kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan melalui penerapan E-Government. E-Government merupakan strategi pemerintah untuk memperbaiki pelayanan publik dan aliran informasi, dengan membangun jaringan digital yang efisien agar pelayanan lebih cepat, hemat biaya, dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

Pelayanan Publik

Beberapa jenis pelayanan publik yaitu pelayanan administrasi kependudukan yang termasuk di dalamnya ialah perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kartu Tanda Penduduk (KTP), khususnya KTP Elektronik (KTP-el), merupakan dokumen penting dalam pelayanan administrasi kependudukan bagi WNI dan WNA yang berusia 17 tahun ke atas atau yang sudah/pernah menikah. KTP-el dilengkapi chip dengan sistem autentikasi digital untuk mencegah pemalsuan dan duplikasi data, serta terhubung ke database kependudukan nasional. KTP berfungsi sebagai alat pencatatan identitas dan dasar akses berbagai layanan publik serta dokumen resmi lainnya. Perkembangan sistem KTP di Indonesia telah mengalami transformasi dari sistem manual ke elektronik. Dasar hukum KTP-el diatur dalam UU No. 24 Tahun 2013 Pasal 64 ayat (1), yang wajibkan semua warga, termasuk pemula, lansia, dan disabilitas, untuk melakukan perekaman dan memiliki KTP-el sebagai identitas resmi yang terintegrasi secara nasional.

Pelayanan Administrasi Kependudukan

Indonesia sebagai negara berkembang menerapkan teknologi digital dalam pelayanan publik melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang bertujuan menciptakan birokrasi terintegrasi, efisien, dan transparan. Salah satu wujud nyatanya adalah pelayanan administrasi kependudukan seperti perekaman e-KTP, yang sangat penting bagi kelangsungan aktivitas masyarakat dan mendukung pembangunan nasional. Sesuai UU No. 23 Tahun 2006, adminduk mencakup pengelolaan data dan dokumen kependudukan untuk mendukung pelayanan publik dan sektor lainnya.



PENDAHULUAN



Periode 2002 - 2004



Periode 2004 - 2010



Periode 2011 - sekarang

Transformasi bentuk KTP dari tahun ke tahun

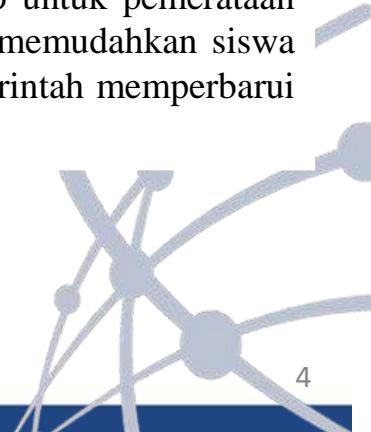
PENDAHULUAN



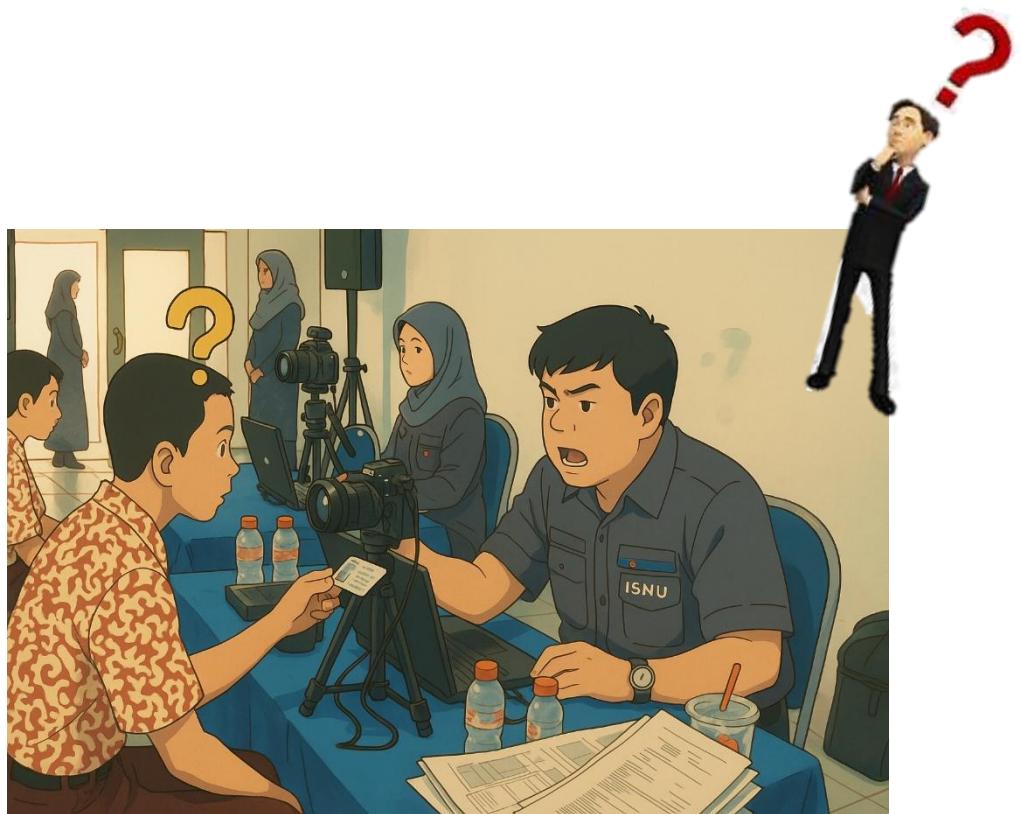
Kabupaten Sidoarjo mempunyai jumlah penduduk 2 juta jiwa berdasarkan data per 2024, dengan usia 15-19 tahun sejumlah 139,26 ribu jiwa, dimana jumlah tersebut memenuhi 6,95% dari jumlah penduduk di Sidoarjo. Untuk meningkatkan kesadaran remaja terhadap akan pentingnya kepemilikan identitas kependudukan atau E-KTP, Disdukcapil Sidoarjo meluncurkan program *Go To School* (GTS) sejak 2022. Program *Go To School* ini mengacu pada Perbup No. 78 Tahun 2016 tentang kependudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo.

Program ini bekerja sama dengan SMA/SMK Se-Kabupaten Sidoarjo untuk melayani perekaman dan pencetakan KTP bagi pemula langsung di sekolah dengan sistem jemput bola. Kegiatan dilakukan setiap Selasa atau Kamis, meliputi proses perekaman lengkap hingga pencetakan di tempat. Sasaran program *Go To School* untuk siswa siswi yang berumur 16 dan 17 tahun. Siswa usia 17 tahun bisa langsung menerima KTP, sementara usia 16 tahun hanya bisa merekam dan mengambil KTP saat sudah berusia 17 tahun di MPP Lingkar Timur.

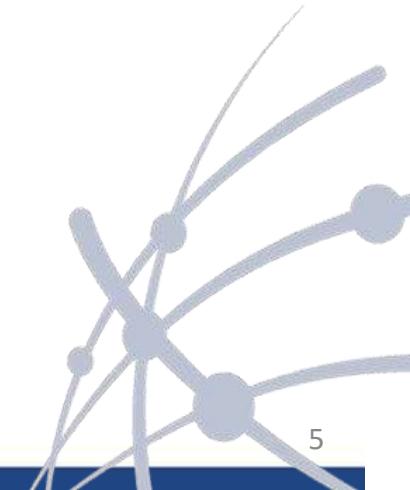
Program *Go To School* merupakan wujud komitmen Pemkab Sidoarjo untuk pemerataan kepemilikan E-KTP, khususnya bagi pelajar usia 17 tahun. Program ini memudahkan siswa mendapat layanan KTP tanpa mengganggu belajar, serta membantu pemerintah memperbarui data kependudukan dan memenuhi target KTP pemula.



RUMUSAN MASALAH



**Bagaimana Implementasi
Program Goes To School
(GTS) Dalam Pelayanan
Pembuatan E-KTP Di
Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil
Kabupaten Sidoarjo?**



PERMASALAHAN YANG DITEMUI

Berdasarkan hasil observasi setiap tahunnya di Kabupaten Sidoarjo jumlah penduduk terus bertambah yang menyebabkan wajib KTP setiap tahunnya juga bertambah. Hal tersebut mengakibatkan pada jumlah yang mengikuti Program Goes To School untuk perekaman dan percetakan KTP juga setiap tahunnya juga ikut bertambah.

Berikut adalah tabel data perbandingan banyaknya siswa siswi SMA/SMK yang sudah rekam sekaligus cetak E-KTP pada Program Goes To School (GTS) tahun 2024 di Kabupaten Sidoarjo:

Table 1. Data Perbandingan yang Sudah Rekam dan Cetak E-KTP pada Program Goes To School Tahun 2024

No	Daftar Sekolah SMA	Yang Sudah Rekam E-KTP	Yang Bisa Cetak E-KTP	Yang Tidak Bisa Cetak E-KTP
1	MA Islamiyah Candi	74	-	74
2	MAN Sidoarjo	62	10	52
3	SMK Mawa Waru	102	6	96
4	SMA 2 Hangtuah Gedangan	112	69	43
5	SMA Antartika Sidoarjo	56	15	41
7	SMA Avisena Jabon	69	37	32
8	SMA Senopati Sedati	73	41	32
9	SMA Wahid Hasyim 2 Taman	41	23	18
10	SMAN 1 Gedangan	72	29	43
11	SMAN 1 Krembung	55	-	55
12	SMAN 1 Porong	64	32	32
13	SMAN 1 Sidoarjo	76	22	54
14	SMAN 1 Waru	114	72	42
15	SMAN 4 Sidoarjo	136	83	53
16	SMAN 1 Sidoarjo	155	-	155
17	SMAS AL Islam Krian	83	15	68
18	SMK Antartika 2 Sidoarjo	170	61	109
19	SMK Antartika 1 Sidoarjo	152	70	82
20	SMK Darul Ulum Waru	59	-	59
21	SMK Islam Krembung	151	71	80
22	SMK Krian 2	150	73	77
23	SMK Ma'arif NU Prambon	54	21	33
24	SMK Penerbangan Sedati	42	-	42
25	SMK Trisakti Tulangan	114	44	70
26	SMK Yapalisa Krian	50	-	50
27	SMK YPM 3 Taman	81	39	42
28	SMK YPM 8 Sidoarjo	105	23	82
29	SMK YPM 11 Wonoayu	75	37	38
30	SMKN 1 Sidoarjo	101	18	83
31	SMKN 3 Buduran	65	12	53

Sumber : Hasil olah peneliti, dari Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025



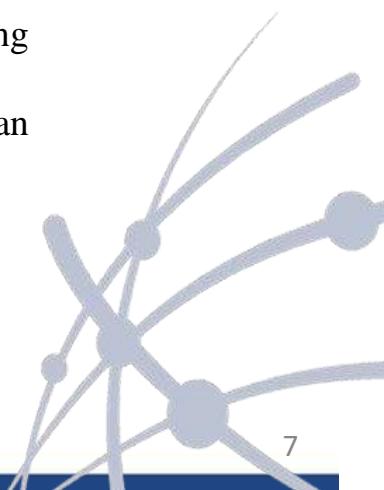
Permasalahan yang ditemui :



Berdasarkan Tabel 1, banyak siswa antusias mengikuti program Goes To School di Kabupaten Sidoarjo, namun hal ini membuat Disdukcapil kewalahan. Hasilnya, hanya 30% hingga 50% E-KTP yang berhasil dicetak. Dari yang belum tercetak, 30% adalah siswa berusia 16 tahun, sementara 70% sudah berusia 17 tahun. Bagi siswa yang sudah 17 tahun namun belum bisa cetak di tempat, KTP bisa diambil di Mall Pelayanan Publik (MPP) dalam 1–2 hari. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, idealnya pada Program Goes To School siswa berusia 17 tahun bisa langsung rekam dan cetak KTP di lokasi. Program Goes To School belum berjalan optimal karena beberapa kendala. Permasalahan tersebut dapat terjadi karena :

1. Jumlah pegawai Disdukcapil tidak mencukupi, idealnya jumlah pegawai 120 orang, tapi saat ini hanya ada 90, dan hanya 10 yang ditugaskan untuk program ini.
2. Sarana dan prasarana belum memadai.
3. Keterbatasan waktu karena harus menyesuaikan jadwal sekolah dan jam kerja Disdukcapil.
4. Data dari pusat belum sepenuhnya sinkron, sehingga ada siswa berusia 17 tahun yang belum bisa langsung cetak KTP.
5. Masalah SOP dari program tersebut juga belum jelas dan program tersebut juga kurang sistematis.

Adapun hal tersebut menyebabkan pelaksanaan program tidak maksimal dan menimbulkan antrian panjang.

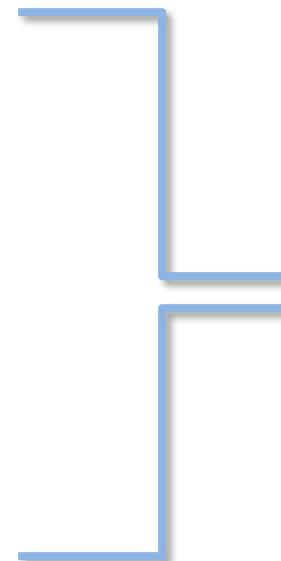


PENELITIAN TERDAHULU

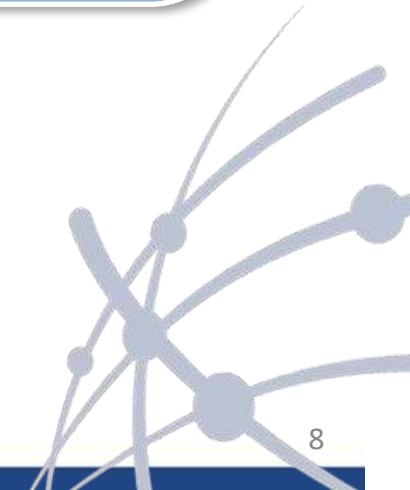
Putri Bunga Kasih dan Hagia Harsanti, 2022 dengan judul “Implementasi Program Jemput Bola Layanan E-Ktp Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara”.

Hery Herawan, Candradewini, Ratna Meisa Dai, 2021 dengan judul “Implementasi Kebijakan Peningkatan Layanan Administrasi Kependudukan Dalam Pembuatan Ktp El Di Kabupaten Bandung”.

Maria Anis Suhartatik, Isnaini Rodiyah, 2024 berjudul “Implementasi Program Sipraja dalam Pelayanan Administrasi Publik”



Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa berbagai kendala dalam pelayanan administrasi kependudukan masih sering terjadi hingga saat ini. Adapun hambatan utama dalam implementasi program pelayanan kependudukan yakni kurangnya SDM, sarana prasarana yang terbatas, lemahnya komunikasi dan sosialisasi, serta belum optimalnya struktur organisasi dan penguasaan teknologi oleh pelaksana.



METODE

Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif dengan metode deskriptif.

Pendekatan Teori

Penelitian ini mengacu pada teori implementasi menurut George C. Edward III (1980: 10) , terdiri atas 4 indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui **observasi, dokumentasi, dan wawancara**.

Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini yaitu terkait dengan Implementasi program Goes To School (GTS) dalam pelayanan pembuatan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo.

Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik ***purposive sampling***.

Teknik Analisis Data

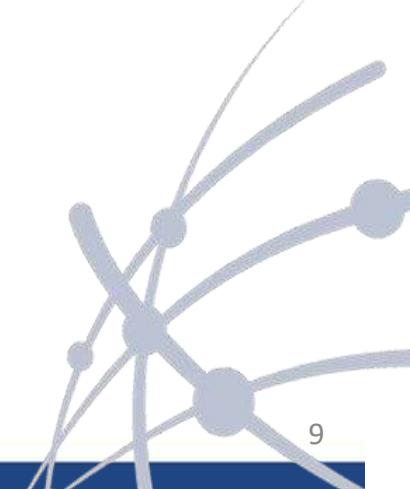
Teknik analisis data, yakni di analisis menggunakan model analisis menurut Miles dan Huberman (1994) ada 4 yakni : **pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan**.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo.

Sumber Data

- Data Primer
- Data Sekunder



HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Komunikasi

Komunikasi memegang peranan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam program Goes To School, Disdukcapil Sidoarjo memulai komunikasi dengan mengirim surat ke sekolah. Baik sekolah yang mengajukan maupun tidak tetap dilayani. Setelah itu, dilakukan survei dan sosialisasi kepada guru, yang kemudian menyampaikan informasi ke siswa. Proposal berisi rincian program juga diberikan agar sekolah memahami dan menyetujui kegiatan tersebut. Pembagian tugas dalam tim sudah jelas dan sesuai fungsi. Komunikasi internal yang baik ini membuat program berjalan lancar. Konsistensi pelaksanaan, yang awalnya seminggu sekali lalu menjadi dua kali pada 2024 karena pemilu, turut menunjang efektivitas program. Komunikasi dalam Program Goes To School sudah terimplementasikan dengan baik, dibuktikan dengan banyak nya sekolah yang sudah bekerja sama setiap tahunnya terus bertambah seperti diagaram 1 dibawah ini :



Sumber: Hasil olah peneliti, dari Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo (2025)

Diagram 1. menunjukkan peningkatan jumlah sekolah bekerja sama dalam program Goes To School pada 2023–2024. Peningkatan jumlah sekolah yang bekerja sama dengan Disdukcapil dalam program Goes To School menunjukkan bahwa program ini semakin efektif dan mendapat respons positif dari sekolah-sekolah di Kabupaten Sidoarjo. Konsistensi dalam pelaksanaan program dan peningkatan frekuensi pelaksanaannya pada tahun 2024 berperan penting dalam meningkatkan angka kepemilikan E-KTP bagi siswa usia 17 tahun. **Maka dari itu adanya konsistensi yang baik juga terjadi karena komunikasi yang baik antar Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo dengan sekolah SMA/SMK se Kabupaten Sidoarjo.**

HASIL DAN PEMBAHASAN

2. Sumber Daya

Sumber daya ialah unsur utama dalam menganalisis kebijakan yang sedang dijalankan, yang terdiri dari tiga aspek, yaitu sumber daya manusia, sumber daya keuangan atau anggaran, dan sumber daya fasilitas atau sarana prasarana. Sumber daya pada Program Goes To School di Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya, terutama terkait keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas, dan kendala teknis, meskipun dukungan anggaran dinilai memadai. Keterbatasan jumlah staf, alat cetak, serta masalah jaringan dan teknis lainnya menyebabkan program belum berjalan optimal, terutama saat menangani banyaknya peserta perekaman.

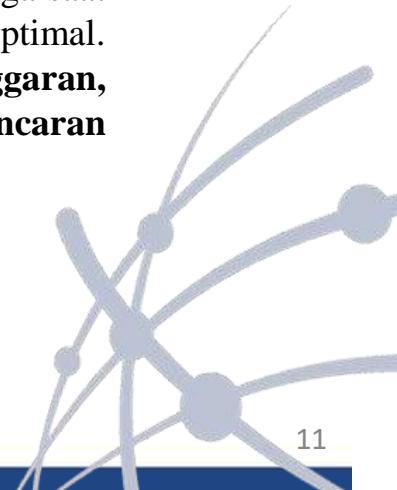
Meski demikian, para petugas telah memiliki kualifikasi yang memadai dan berupaya maksimal dalam memberikan pelayanan. Kesuksesan implementasi program ini sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya yang memadai. Adapun kurangnya sumber daya yang dapat membuat pengimplementasian program berjalan tidak optimal dibuktikan dengan data jumlah pegawai Keseluruhan di Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025:

Tabel 2. Data Jumlah Pegawai Keseluruhan Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025

No	Nama Jabatan	Jumlah
1.	ASN	41 Orang
2.	PPPK	07 Orang
3.	Non ASN	34 Orang
4.	Outsourcing	15 Orang

Sumber: Hasil Olah Peneliti, dari Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo (2025)

Tabel 2. menunjukkan jumlah pegawai Disdukcapil Sidoarjo saat ini sebanyak 90 orang, masih di bawah kebutuhan ideal yaitu 120 orang. Dalam program Goes To School, hanya maksimal 10 pegawai yang ditugaskan, sehingga saat peserta perekaman banyak, pelaksanaan program menjadi kurang optimal. **Oleh karena itu, dengan ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, dan fasilitas yang memadai sangat penting untuk mendukung kelancaran program.**



HASIL DAN PEMBAHASAN

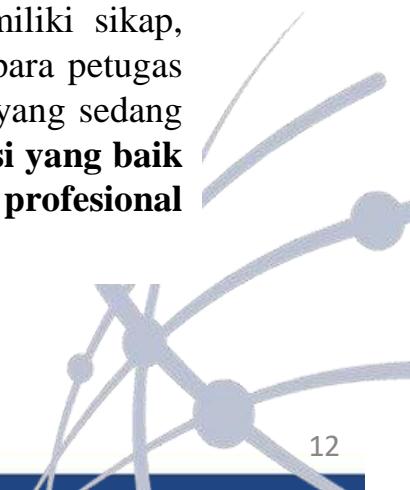
3. Disposisi



Gambar 1. Kinerja pegawai saat Program Goes To School
Sumber: Hasil olah peneliti, dari Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo (2025)

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan memainkan peranan dimana sangat penting dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Agar kebijakan dapat terlaksana secara efektif, pelaksana kebijakan perlu memahami langkah-langkah yang perlu dilakukan serta memiliki keahlian yang dibutuhkan untuk melaksanakannya dengan baik. Pada Program Goes To School di Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo, sangat bergantung pada disposisi pelaksana yang mencakup sikap, komitmen, keterampilan, dan pemahaman terhadap kebijakan. Disposisi disini sudah terimplementasikan dengan baik yakni seperti Pemilihan birokrat yang tepat, evaluasi kinerja yang rutin, serta pemberian insentif berupa SPPD. Adapun kinerja pegawai yang baik dan juga memiliki kualifikasi serta pemahaman yang memadai mengenai kebijakan pelayanan perekaman E-KTP dalam Program Goes To School dapat dilihat pada dokumentasi berikut :

Dari gambar 1. Dapat dilihat bahwa para pegawai yang sedang bertugas pada Program Goes To School ini menunjukkan bahwa memiliki sikap, karakteristik, kualifikasi serta pemahaman yang memadai. Dan para petugas yang ada di lapangan juga telaten dalam melayani para siswa yang sedang melakukan perekaman E-KTP. **Maka dari itu adanya Disposisi yang baik membuat pelaksana tetap menjalankan tugas secara profesional meskipun menghadapi berbagai tantangan.**



HASIL DAN PEMBAHASAN

4. Struktur Birokrasi

Keberhasilan kebijakan publik sangat ditentukan oleh struktur birokrasi. Meskipun tersedia sumber daya dan pelaksana memahami serta termotivasi menjalankan tugas, kelemahan dalam struktur birokrasi dapat menghambat implementasi kebijakan. Struktur ini mencakup dua aspek utama: standar operasional prosedur (SOP) dan fragmentasi. Program Goes To School (GTS) di Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa struktur birokrasi yang terorganisir, koordinasi yang baik antarinstansi, serta penggunaan SOP global yang ada, mampu mendukung efektivitas pelayanan publik, meskipun belum memiliki SOP khusus. Keterlibatan berbagai pihak, termasuk DPR dan pihak sekolah, memperkuat pelaksanaan program melalui pengawasan dan sinergi. Adapun SOP global bidang dafduk yang digunakan dalam pengimplementasian Program Goes To School agar program bisa berlangsung dengan baik, yaitu pada tabel 3 berikut :

Dari tabel 3. Dapat dilihat bahwa Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo untuk pelayanan perekaman KTP bagi pemula pada Program Goes To School mengacu pada SOP global bidang dafduk. Hal tersebut dilakukan agar Program Goes To School di SMA se Kabupaten Sidoarjo berjalan secara optimal. **Hal ini menegaskan bahwa meski birokrasi bisa kompleks, koordinasi yang efisien dan fleksibilitas dalam prosedur tetap dapat memastikan kebijakan berjalan dengan baik dan mencapai tujuannya.**

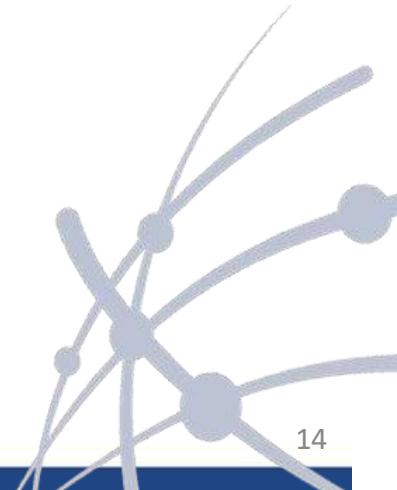
Tabel 3. SOP Pelayanan Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) Bagi Pemula

No	Kegiatan	SOP PELAYANAN PEREKAMAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) WNI PEMULA						Keterangan	
		Pelaksana			Mutu Baku				
		Pemohon	JFU/Pelaksana	Subko/Kabid	Kadis	Kelengkapan	Waktu		
1	Pemohon membawa berkas permohonan perekaman KTP - Elektronik secara offline					Dokumen Persyaratan	10 menit	Berkas Persyaratan	
2	Pemohon Mengambil nomer antrian pada mesin antrian yang sudah disediakan					Dokumen Persyaratan	5 menit	Berkas Persyaratan, Nomer Antrian	
3	Pelaksana Melakukan verifikasi berkas persyaratan, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi kembali					Dokumen Persyaratan	5 menit	Berkas Persyaratan yang telah diverifikasi oleh Petugas	
4	Pelaksana Melakukan Perekaman Data Biometric pemohon					Dokumen Persyaratan, Komputer, Alat Perekaman Biometric	3 menit	Perekaman Data Biometric	
5	Pelaksana Memberikan tanda terima Pencetakan KTP - Elektronik					Tanda Terima Perekaman KTP - Elektronik	1 menit	Tanda Terima Pencetakan KTP - Elektronik	
6	Pemohon Menerima tanda terima Pencetakan KTP - Elektronik					Tanda Terima Perekaman KTP - Elektronik	1 menit	Tanda Terima Pencetakan KTP - Elektronik	

Sumber: Hasil olah peneliti, dari Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo (2025)

Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Goes To School di Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo berjalan cukup efektif. Dari sisi komunikasi, informasi disampaikan dengan jelas dan pembagian tugas terorganisir, meskipun perlu peningkatan dalam pembaruan informasi. Dari aspek sumber daya, program masih terkendala pada jumlah staf dan fasilitas teknis, meskipun anggaran sudah memadai. Pada indikator disposisi, pegawai menunjukkan sikap positif dan kualifikasi yang baik, didukung evaluasi kinerja dan insentif rutin. Sementara itu, struktur birokrasi berjalan efektif melalui koordinasi yang baik meski masih mengacu pada SOP umum, sehingga disarankan dibuat SOP khusus untuk program ini.



REFERENSI

- [1] Adinata, M. A., Putera, R. E., Kusdarini, K., Publik, D. A., & Andalas, U. (2024). Penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan pemerintah kota batam. *Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 704–716.
- [2] Bardach, E. (1980). *The Implementation Game: What Happens After a Bill Becomes a Law*. MIT Press.
- [3] Berlianto, A., & Muljanto, M. A. (2024). Implementasi Program “Paling Jempol” Ktp Untuk Pemula. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(2), 254. <https://doi.org/10.31258/jkp.v15i2.8492>
- [4] Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World* (M. S. Grindle (ed.)). Princeton University Press.
- [5] Habermas, J. (1984). *The Theory of Communicative Action: Volume 1: Reason and the Rationalization of Society*. Beacon Press. <https://doi.org/10.31258/jkp.v15i2.8492>
- [6] Hasibuan, E. H., Badaruddin, & Karyono. (2020). Implementasi Kebijakan E-KTP Dalam Pelayanan Implementation of E-KTP Policy in Padangsidimpuan City. *PERSPEKTIF*, 9(2), 465–482.
- [7] Herawan, H., & Dai, R. M. (2021). Implementasi Kebijakan Peningkatan Layanan Administrasi Kependudukan dalam Pembuatan KTP-EL di Kabupaten Bandung. *Responsive*, 4(1), 23–28.
- [8] Hidayat, H., Budiman, A., & Raudah, S. (2024). Implementasi Program Jemput Bola Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Kabupaten Balangan. *Jurnal Pelayanan Publik*, 1, 714–720.
- [9] Hood, C. (1983). *The Tools of Government*. Macmillan.
- [10] Indarwati, N., & Mirani, D. (2021). Implementasi Kebijakan Jemput Bola Administrasi Perekaman e-KTP bagi Disabilitas di Kota Palembang. *PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik*, 2, 35–48. <https://doi.org/10.47753/pjap.v2i1.28>
- [11] Kasari, M. H., Rohmah, D. N., Rohmah, A., Widyaningsih, A., & Oktaviyanti, A. (2024). Inovasi Dalam Organisasi: Inovasi Program E – Lampid Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya. *Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 2(95), 382–391.
- [12] Kasih, P. B., & Harsanti, H. (2022). Implementasi Program Jemput Bola Layanan E-Ktp Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Registratie*, 4(2), 114–128. <https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v4i2.2809>
- [13] Lenaini, I. (2021). Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling. *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6(1), 33–39. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/historis>



REFERENSI

[13] Lenaini, I. (2021). Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling. *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6(1), 33–39. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/historis>

[14] Manshuri, S., & Rahaju, T. (2023). Implementasi Program Inovasi Aplikasi Klampid New Generation (Kng) Di Kelurahan Wonokromo Kota Surabaya. *Publika*, 2491–2504. <https://doi.org/10.26740/publika.v11n4.p2491-2504>

[15] Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and Public Policy*. Scott, Foresman and Company.

[16] Mellinda Clarisa, Z., & Megawati. (2022). Implementasi Program Jadek (Jauh Jadi dekat) Dalam Pembuatan KTP-el di Desa Mandirejo Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban Zana Malinda Clarissa Suci Megawati. *Publika*, 10(135–148), 14.

[17] Meter, D. S. Van, & Horn, C. E. Van. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488. <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>

[18] Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (1994). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. SAGE Publications, 2014. Accessed: Nov. 20, 2024. [Online]. <https://books.google.co.id/books?id=p0wXBAAAQBAJ&lpg=PP1&hl=id&pg=PR4#v=onepage&q&f=false>

[19] Patu, F., Pramudiana, I. D., Artikel, H., Kependudukan, A., Disabilitas, E. B., & Kabupaten, D. (2023). Implementasi Pelayanan Administrasi Kependudukan E-KTP Bagi Disabilitas Di Kabupaten Manggarai Timur. *Jurnal Ilmiah Riset Dan Pengembangan*, 8, 1–8.

[20] Prasetyowati, T., Kurniawan, B. A., & Agustina, D. E. (2023). Impementasi Program Jumpa Artis (Jemput Bola Pelayanan Gratis) Di Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora*, 7(2), 592. <https://doi.org/10.31604/jim.v7i2.2023.592-602>

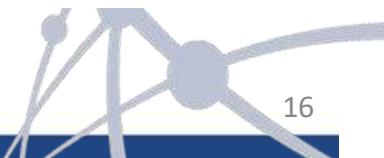
[21] Putra, R. S., & Pertiwi, V. I. (2023). Jemput Bola Terpadu Goes To School (Jbt Gts) Sebagai Inovasi Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9, 602–612. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10081701>

[22] Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>

[23] Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta.

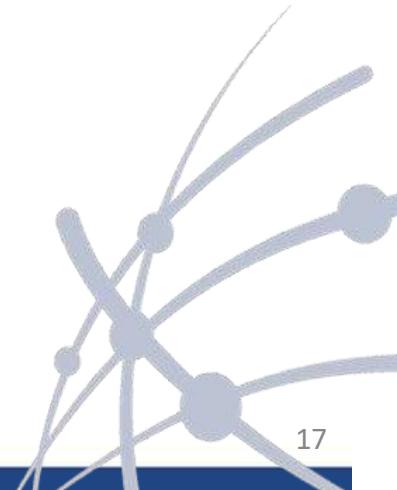
[24] Suhartatik, M. A., & Rodiyah, I. (2024). Implementation of the Sipraja Program in Public Administrative Services : Implementasi Program Sipraja dalam Pelayanan Administrasi Publik. *Indonesian Journal of Public Policy Review*, 25(3), 1–17.

[25] Syamuni, P., Sya'bani Arlan, A., Dharma, A. S., Studi, P., Publik, A., Tinggi, S., & Amuntai, I. A. (2024). Efektivitas Program Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-Ktp) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan.



REFERENSI

- [26] Tukan, A. A. F., & Rahmadanita, A. (2023). Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (Ikd) Di Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Registratie*, 5(2), 162–180. <https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v5i2.3717>
- [27] Wahab, S. A. (2008). Analisis kebijaksanaan : Dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara. Kencana.
- [28] Weber, M. (1978). *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*, Volume 1. Univ of California Press.
- [29] Wulandari, S., & Widowati, A. (2023). Implementasi Program Sipelandukilat dalam Peningkatan Pelayanan Publik di Wilayah Perbatasan dan Pedalaman. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 6(1), 11–24. <http://ejournal.ipdn.ac.id/JKP/article/view/3179%0Ahttps://ejournal.ipdn.ac.id/JKP/article/view/3179/1544>



TERIMAKASIH

